

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Dafa Fadhila
Npm : 2105170003
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (064) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DATA FADHILA
NPM : 2105170003
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Tim Penguji

Penguji I

(Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si.)

Penguji II

(M. Fizza Alpi, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Hj. Hafsal, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.)



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DAFA FADHILA

N.P.M : 2105170003

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2025

Pembimbing Skripsi


(HJ. HAFSAH, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

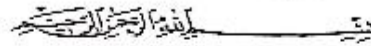

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANEM, S.E., M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si, CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan. Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Dafa Fadlila
NPM : 2105170003
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Kejelasan Susunan Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Lengkapi tugas akhir	14/2025 2	
Bab 2	Pengutipan teori sesuai pedoman		
Bab 3	Sesuai dan utuh	17/2 2	
Bab 4	Hasil penelitian ditugas kembali Pembahasan di pengantar	21/2 2	
Bab 5	Kejelasan hasil penelitian Pembahasan	24/25 2	
Daftar Pustaka	Daftar Pustaka sesuai kutipan	27/25 2	
Persetujuan Sidang Meja Bujur	Selamat Bimbingan	10/2025 3	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULFA HANUM, SE, M.Si

Medan, Februari 2025
Dosen Pembimbing

Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dafa Fadhila
NPM : 2105170003
Konsentrasi : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi Sektor Publik)
Judul : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perguruan Tinggi : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2025
Pembuat Pernyataan


DAFA FADHILA

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan ditampirkan di proposal dan skripsi

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dafa Fadhila
2105170003

ABSTRAK

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota Medan belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota Medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Dengan jumlah pegawai 40 orang. Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah mulai November 2024 sampai Januari 2025. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, penelitian ini menggunakan metode angket dengan penyebaran kuesioner kepada setiap pegawai sebagai pengumpulan datanya. Teknik penarikan sampel dari penelitian ini adalah purposive sampling yang mana teknik ini sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif. Teknik analisis data yaitu statistik deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS. Versi 4.1.0.9 Hasil dari penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pelaporan Berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

The Influence of Clarity of Budget Targets, Internal Control and Reporting Systems on Performance Accountability of Government Agencies

Dafa Fadhila
2105170003

ABSTRACT

Previously, the Regional Financial and Asset Management Agency was still a small work unit, namely the finance section of the Medan city regional secretariat with the main task of managing the finances of the Medan city government. Considering that at that time the potential financial management tasks of the Medan city government were not yet so complex, the Medan city finance section consisted of 5 sub-sections, namely budget, treasury, salaries, verification and bookkeeping. Medan City Regional Financial and Asset Management Agency which is capable of serving as a context for public services in the framework of good governance. This research aims to test and analyze the influence of Clarity of Budget Targets, Internal Control and Reporting Systems. This research was conducted at the Medan City Regional Financial and Asset Management Agency. With a total of 40 employees. The time used by researchers to conduct this research is from November 2024 to January 2025. This research is quantitative with an associative approach, this research uses a questionnaire method by distributing questionnaires to each employee to collect data. The sampling technique for this research is purposive sampling, which is appropriate to the type of research carried out, namely quantitative. The data analysis technique is descriptive statistics. This research uses a data analysis method using SmartPLS software. Version 4.1.0.9 The results of this research are that Clarity of Budget Targets has a significant effect on Performance Accountability of Government Agencies, while Internal Control has no significant effect on Performance Accountability of Government Agencies, Reporting Systems have a significant effect on Performance Accountability of Government Agencies.

Keywords: *Clarity of Budget Targets, Internal Control, Reporting System, Performance Accountability of Government Agencies.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat lulus untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul “**Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**”.

Penulis menyadari bahwa menyelesaikan Skripsi ini akan menjadi tugas yang sulit. Namun, penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan terstruktur dan terencana tentunya berkat doa, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tersayang **Sugi Waluyo** dan Ibunda tercinta **Yenni Anggriani** yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, bimbingan kepada penulis. dan tak lupa juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Hj. Hafsah, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Saudara kandung Dinah Hulwah, Najwa Davina dan Nailah Risqi atas bantuan serta waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Muhammad Raihan, Bipasyal Attariq, Muhammad Rayhan, Dimas Arfangga, Muhammad Riski, Ridho Nanda Putra, Muhammad Mukhtar Maajid, Sendi Syahputra, Rais Ali Two As Munthe dan teman-teman KKN Alifya Safara, Malika Ayu, Dinda Annisa, Dini Sri Wahyuni, Fitria Dwi Lestari, Syahrani Ananda, Mutiara Yasmin Terimakasih teman-teman atas dukungan, do'a, bantuan serta saran yang begitu besar dan meluangkan waktunya membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kemajuan penulis dimasa mendatang. Penulis berharap semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Medan, 10 Januari 2025

Penulis

Dafa Fadhila
2105170003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	8
1.3.Rumusan Masalah	9
1.4.Tujuan Penelitian	9
1.5.Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
2.1.Landasan Teori	11
2.1.1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	11
2.1.1.1. Pengertian Akuntabilitas	11
2.1.1.2. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas Publik.....	14
2.1.1.3. Dimensi Akuntabilitas Publik.....	14
2.1.1.4. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
2.1.1.5. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	17
2.1.1.6. Konsep Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	17
2.1.2. Kejelasan Sasaran Anggaran.....	19
2.1.2.1. Pengertian Anggaran	19
2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Anggaran	20
2.1.2.3. Fungsi Anggaran	21
2.1.2.4. Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran	23
2.1.2.5. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran	23
2.1.3. Pengendalian Internal.....	24
2.1.3.1. Pengertian Pengendalian Internal	24
2.1.3.2. Tujuan Pengendalian Internal	25
2.1.3.3. Indikator Pengendalian Internal	25

2.1.4. Sistem Pelaporan	27
2.1.4.1. Pengertian Sistem Pelaporan	27
2.1.4.2. Indikator Sistem Pelaporan.....	28
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Konseptual	30
2.3.1. Keterkaitan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	30
2.3.2. Keterkaitan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	31
2.3.3. Keterkaitan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	33
2.4. Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Definisi Operasional.....	37
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.4. Populasi dan Sampel	39
3.4.1. Populasi	39
3.4.2. Sampel.....	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5.1. Uji Validasi	42
3.5.2. Uji Reabilitas.....	43
3.6. Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1. Uji Statistik Deskriptif	43
3.6.2. Uji Hipotesis	44
3.6.2.1. Analisis SEM	45
3.6.2.2. Evaluasi Outer Model	46
3.6.2.3. Evaluasi Inner Model	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
4.1. Deskripsi Data	50
4.1.1. Karakteristik Responden.....	50
4.1.1.1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
4.1.1.2. Karakteristik Berdasarkan Usia	51
4.1.1.3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan.....	52
4.1.2. Analisis Variabel Penelitian.....	52

4.1.2.1. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kejelasan Sasaran anggaran.....	53
4.1.2.2. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Pengendalian Internal	55
4.1.2.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Sistem Pelaporan	57
4.1.2.4. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	59
4.2. Analisis Data.....	60
4.2.1. Outer Model	60
4.2.1.1. Convergent Validity	60
4.2.1.2. Discriminant Validity.....	65
4.2.1.3. Composite Reability.....	66
4.2.2. Inner Model	67
4.2.2.1. Uji R-Square	67
4.2.2.2. Uji Hipotesis	68
4.3. Pembahasan.....	69
4.3.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	69
4.3.2. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70
4.3.3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	72
BAB V PENUTUP.....	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74
5.3. Keterbatasan.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL.

Tabel 1.1 Data Permasalahan Terkait	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional	38
Tabel 3.2 Pelaksanaan Waktu Penelitian	39
Tabel 3.3 Daftar Jumlah Pegawai	40
Tabel 3.4 Skala Penilaian untuk Pernyataan Positif.....	42
Tabel 3.5 Kategori Skala.....	44
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	51
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	52
Tabel 4.4 Jawaban Responden Variabel Kejelasan Sasaran anggaran	53
Tabel 4.5 Jawaban Responden Variabel Pengendalian Internal	55
Tabel 4.6 Jawaban Responden Variabel Sistem Pelaporan	57
Tabel 4.7 Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	59
Tabel 4.8 Convergent Validity Kejelasan Sasaran Anggaran.....	61
Tabel 4.9 Convergent Validity Pengendalian Internal.....	61
Tabel 4.10 Convergent Validity Sistem Pelaporan	62
Tabel 4.11 Convergent Validity Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	63
Tabel 4.12 Penjelasan angka dari tabel 4.1	64
Tabel 4.13 Average Variance Extracted	65
Tabel 4.14 Composite Reliability.....	66
Tabel 4.15 Cronbach Alpha	67
Tabel 4.16 Uji R-Square	67
Tabel 4.17 T-Statistic dan P value	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	34
Gambar 3.1 Model Stuktural PLS Penelitian.....	46
Gambar 4.1 Outer Loading	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner	80
Lampiran 2 Tabulasi Kuisisioner.....	86
Lampiran 3 Outer Loading Kuisisioner	90
Lampiran 4 Outer Loading Matrix	91
Lampiran 5 R-Square Overview	91
Lampiran 6 Construct Reability and Validity Overview	92
Lampiran 7 Outer Boostrooping	92
Lampiran 8 Path Coefisient-Mean,Stdev,T-Value,P-value.....	93
Lampiran 9 R-Square-Mean,Stdev,T-Value,P-Value	93
Lampiran 10 Average Variance Extracted-Mean,Stdev,T-Value,P-Value	93
Lampiran 11 Composite Reability-Mean,Stdev,T-Value,P-Value	93
Lampiran 12 Cronbach Alpha-Mean,Stdev,T-Value,P-Value	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah.

Pada tahun 2022 penyerapan kejelasan anggaran Kota Medan sebesar 78,9 persen dari target. dengan angka tersebut realisasi belanja Pemko Medan menduduki urutan ke-14 paling rendah dibandingkan kota lain di Indonesia,urgensi penyerapan anggaran di Indonesia khususnya di Kota Medan yang setiap tahunnya masih menghadapi pola permasalahan yang berupa penyerapan anggaran yang rendah dan tidak proporsional pada akhir tahun.

Kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampak penyerapan anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian Internal, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (alpi,2019).

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjalankan kegiatan sesuai dengan RAK dan berkoordinasi antar bagian untuk keberhasilan tingkat kinerja yang ingin dicapai. Namun masih terdapat beberapa pegawai yang belum menjalankan RAK.

Pengendalian merupakan suatu proses melalui manajemen suatu organisasi membuat keyakinan yang beralasan bahwa sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan andal, kebijakan, hokum dan peraturan yang relevan diikuti. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata dapat dilakukan apabila dilakukan pengendalian manajemen yang baik.

Sistem Pengendalian Internal adalah Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015 : 218). Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016 : 129). Pengendalian Internal adalah Seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala

bentuk tindakan penyalagunaan menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kegiatan tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas (Eka Nurmala,2020).

Sistem pelaporan merupakan kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktifitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, serta politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggung jawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam penelitian ini, penulis memilih di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebagai objek penelitian. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar ke-3 di Indonesia. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Fenomena yang terjadi saat ini dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan

Tabel 1.1
Data Permasalahan Terkait

No	Permasalahan	Referensi
1	Pemerintah masih harus mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
2	Masih Adanya bagian yang belum menjalankan kegiatan sesuai dengan RAK yang telah disusun serta Koordinasi yang kurang efektif dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.	https://portal.medan.go.id/
3	penerapan system aplikasi SIPD masih mengalami kendala diakibatkan belum memahami sistem aplikasi tersebut, sehingga pelaksanaannya belum mencapai tahap maksimal. dan keterlambatan penginputan dan masih ada operator yang masih belum dapat mengerti menggunakan aplikasi berbentuk web.	https://infopublik.id/

Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Dengan adanya target pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti ditahun sebelumnya pemerintah Kota Medan melakukan tahap uji coba pada sistem pelaporan anggaran dan keuangan dengan menggunakan sebuah aplikasi yang berbentuk web yaitu sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yang sebelumnya menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kota Medan, namun dalam menjalankan program ini tidak lah mudah, pada awal penerapan system aplikasi SIPD masih mengalami kendala diakibatkan beberapa pegawai belum memahami system aplikasi tersebut, sehingga pelaksanaannya belum mencapai tahap maksimal. Dengan berjalannya waktu penerapan system aplikasi SIPD berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala namun bisa diatasi, beberapa pegawai yang mengalami keterlambatan penginputan dan masih ada operator yang masih belum dapat mengerti menggunakan aplikasi berbentuk web ini, banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian juga terhambat dikarenakan jaringan SIPD sering error.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang inkonsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aprilianti (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Secara parsial, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena bila kejelasan sasaran anggaran. Serta secara parsial Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta secara parsial Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rusnanda Dian Kartika, Sukanto (2019) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Daerah Kota Surabaya). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan variabel pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas peneliti menemukan kesenjangan yaitu terdapat hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan memicu pertanyaan baru yang mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan”.**

1.2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu meningkatkan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan misi organisasi.
2. Masih adanya bagian yang belum menjalankan RAK (rencana aksi kerja) sesuai yang disusun dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas kinerja.
3. Peralihan perubahan sistem dari SIMDA ke Pemendagri No. 77 Tahun 2020 yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih belum dapat dimengerti penggunaan aplikasi berbentuk web ini, dan juga jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan.

1.3. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Medan?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Medan?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Medan?
4. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian.

- a. Bagi penulis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta dapat mengaplikasikan dalam teori dan praktek.

- b. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan bahwa pentingnya Kejelasan sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan untuk memaksimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- c. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.

2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pada pihak- pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak mengetahui, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk didengar pendapatnya.

PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas terbagi menjadi 2 macam yaitu Akuntabilitas Vertikal dan Akuntabilitas Horizontal:

1. Akuntabilitas Vertikal.

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal.

Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas yang setara dan tidak ada hubungan atasan dan bawahan. Biasanya terjadi dalam konteks pelayanan publik dan mendorong kerja sama dan transparansi antarindividu.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan ini kemudian memunculkan perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga tersebut.

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan interchangeable, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang *participative* sebagai suatu konsekuensi logis (Akbar, 2012). Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk mengelola sumber daya dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat(*principal*) (Mahmudi,2007)

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik. 2) penyajian tepat waktu. dan 3) adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

2.1.1.2. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas Publik

Tujuan Akuntabilitas Publik ialah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya dan dana publik yang digunakan pemerintah, Akuntabilitas publik juga bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah.

Manfaat dari Akuntabilitas Publik sebagai berikut:

1. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
3. Memudahkan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2.1.1.3. Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah : “Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atau kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.1.4. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nadirsyah, dkk (2012 : 64) Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program (Fitriani Saragih, 2020).

2.1.1.5. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002:21), akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator yaitu :

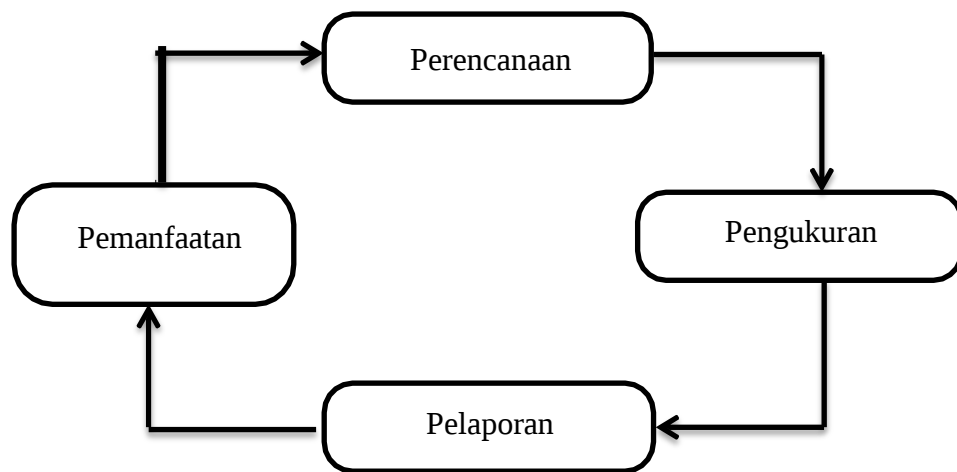
1. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power).
2. Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
3. Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.1.6. Konsep Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni: 1) *accountability for probity and legality*; 2) *process Accountability*, 3) *performance Accountability*, 4) *programme Accountability*, dan 5) *policy Accountability*. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2012, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.



Gambar 2.1
(sumber: BPKAD Kota Medan)

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.2. Kejelasan Sasaran Anggaran.

2.1.2.1. Pengertian Anggaran.

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*. M.Nafarin (2007:11) menyatakan, “Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”. Anggaran yang realistis akan meningkatkan koordinasi antar individu, terlaksananya kebijakan manajemen dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Rudianto (2009:2) dalam bukunya yang berjudul Penganggaran, “Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.” anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Sedangkan

menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya.

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu (Edisah putra, 2014). Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik, terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja, dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Anggaran.

Tujuan anggaran menurut Nafarin (2007:13) adalah sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Merinci jelas sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.

6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Adapun manfaat anggaran yang berdampak untuk perusahaan ialah sebagai berikut:

1. Alat Pengkoordinasi.

Anggaran dapat membantu koordinasi kerja antar bagian Perusahaan agar dapat bekerja sama dengan manajemen.

2. Alat Evaluasi.

Anggaran dapat membantu mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan.

3. Menyajikan Tujuan Organisasi.

Anggaran dapat menyajikan tujuan dan harapan organisasi secara formal dan jelas.

2.1.2.3. Fungsi Anggaran.

Menurut Mardiasmo (2009:71) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Alat Perencanaan (*planning tool*).
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh sektor publik dari belanja perusahaan tersebut.
2. Alat Pengendalian (*control tool*).
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:
 - a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
 - b. Menghitung selisih anggaran
 - c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians

- d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
3. Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*fiscal tool*).
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*coordination and communication*).
Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
5. Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*performance measurement tool*).
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (*legislatif*), kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
6. Sebagai Alat Motivasi (*motivation tool*).
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.1.2.4. Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran.

Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik, sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan (bhakti,dkk 2015:32).

Kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran diperkirakan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kejelasan Sasaran Anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai.

2.1.2.5. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran.

Menurut Widya Restu (2017:18) indikator kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan.
Membuat secara terperinci spesifik, jelas dan dapat dipahami tujuan umum atau tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja.
Menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang dapat diukur. Pengukuran kinerja adalah suatu proses

yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Standar.

Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. Meliputi: luas daerah pemasaran yang ingin dicapai, market share yang ingin dimiliki.

4. Jangka waktu.

Mempunyai jangka waktu dalam membiayai biaya yang akan dikeluarkan dan menentukan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan. Biasanya periode anggaran adalah satu tahun.

2.1.3. Pengendalian Internal

2.1.3.1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016 : 129) Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Krismiaji (2015 : 218) Pengendalian Internal adalah Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Menurut Hery (2013 : 159) Pengendalian Internal adalah Seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalagunaan menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

2.1.3.2. Tujuan Pengendalian Internal.

Tujuan dari pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:129), adalah:

1. Menjaga aset organisasi atau pemerintah
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi pemerintah
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.3.3. Indikator Pengendalian Internal.

Sujarweni (2015:71) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal memiliki 5 indikator sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian.
 Penanggung jawab instansi pemerintah harus membuat dan menjaga lingkungan pengendalian melalui cara-cara berikut, yang akan menghadirkan perilaku yang positif juga serta bermanfaat dan digunakan agar penerapan sistem pengendalian internal di lingkup kerja.
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaansumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Identifikasi risiko; dan Analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pemerintah menetapkan:

- a. Tujuan Instansi Pemerintah.
- b. Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Pengendalian.

Penanggung jawab instansi pemerintah harus melaksanakan kegiatan pengendalian berdasarkan besar kecilnya, kompleksitas dan sifat tanggung jawab instansi pemerintah tersebut. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas terdiri atas (PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 18 ayat 3) :

- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset.
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian sertatransaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi.

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 41 dan Pasal 42, seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib melakukan identifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan semua informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :Pemeriksaan independensi atas kinerja.

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

5. Pemantauan dan Pengendalian Internal.

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 43, Pimpinan Instansi wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.1.4. Sistem Pelaporan

2.1.4.1. Pengertian Sistem Pelaporan.

Sistem pelaporan merupakan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Menurut Anthony (2000) Sistem pelaporan adalah laporan anggaran yang sudah dirinci secara jelas berdasarkan macam-macam prestasi dari anggaran yang dilihat berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan pelaku yang bertanggung atas anggaran.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat meninjau dan membimbing kinerja manajer dalam melaksanakan anggaran yang sebelumnya sudah ditentukan (Afiah & Azwari, 2015). Pemerintah selaku pengelola dana berkewajiban untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP:2000) laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara adil, jujur dan transparan. Laporan umpan balik diperlukan untuk dapat mengukur aktivitas yang dilaksanakan untuk dapat mengembangkan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan rencana atau waktu penetapan suatu anggaran, dengan begitu manajemen akan mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang telah ditetapkan.

2.1.4.2. Indikator Sistem Pelaporan.

Menurut Mahsun (2007), terdapat beberapa indikator Sistem Pelaporan yaitu :

1. Akuntabilitas.
Tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan pedoman pelaksanaan yang diberikan kepada entitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur.
2. Manajemen.
Membantu para pengguna dalam menilai pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan, memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi.
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Masyarakat berhak secara terbuka dan menyeluruh mengetahui pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhan pada hukum dan peraturan.
4. Keseimbangan antar generasi.
Membantu pengguna dalam mengetahui kecukupan pendapatan pemerintah selama periode pelaporan untuk biaya yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.2. Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Herwin Kuriawan (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan	Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Secara parsial, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena Bila kejelasan sasaran anggaran. Serta secara parsial Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta secara parsial Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.	Heksi Kinasih (2018)	Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puworejo)	Hasil Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Ketaatan pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3.	RusnandaDian Kartika, Sukamto (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Daerah Kota Surabaya)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan variable pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.	Ni Made Meisi Cahyani dan Anak Agung Ketut Agus Suardika (2020)	Pengaruh Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada DesaDesa Di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)	Sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung
5.	Jaka Darmawan dan Elisabet Rina Anggaini (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus Pada Tiyuh Yang Terdapat Di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik)	1. Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Audit kinerja dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
6.	Putu Ika Sawitri dan Gayatri (2021)	Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Kompetensi Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.3. Kerangka Konseptual.

2.3.1. Keterkaitan Kejelasan sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan sasaran anggaran yang jelas dapat memudahkan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi.

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik. Kejelasan sasaran anggaran dapat diukur

dengan menggunakan empat indikator variabel, yaitu spesifik, terukur, menantang tapi realistis, dan berorientasi pada hasil akhir.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja.

2.3.2. Keterkaitan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi agar kegiatan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan kebijakan maupun peraturan yang telah ada. Peningkatan etika dan integritas ini bermanfaat agar pegawai tetap dapat menjaga profesionalisme dan objektivitas kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Merujuk pada teori yang dijelaskan Richard M. Steers dimana dibutuhkan suatu kebijakan dan praktik manajemen untuk mencapai keberhasilan organisasi. Diperlukan suatu kebijakan dan manajemen kegiatan yang tepat.

Dengan pengendalian internal yang efektif, maka komunikasi antara semua struktur manajemen dan personil operasional secara langsung akan difasilitasi dengan baik. Karakteristik pengendalian internal yang efektif dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan komunikasi antara manajemen perusahaan dan auditor internal, serta antara manajemen

perrusahaan dengan komite audit kan yang berwenang (Aisyah,Astuty,Hafsah, 2019).

Pengendalian atas kinerja pegawai bermanfaat agar kualitas kinerja pegawai selalu terjaga dan peningkatan kinerja pegaewai diharapkan dapat mendorong keberhasilan pencapaian organisasi. Richard M. Steers menjelaskan bahwa karakteristik pekerja menjadi faktor yang menunjang terciptanya suatu efektivitas. Aspek personil merupakan aspek utama yang paling berpengaruh terhadap efektivitas.Pengendalian atas kepegawaian ini dilakukan karena diperlukan suatu integrasi antara tujuan personal dan tujuan organisasi yang dapat berjalan beriringan sehingga saling mendukung dalam keberhasilan organisasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas antara aspek individu dan organisasi yang saling berkesinambungan untuk menjamin keberhasilan peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.Selanjutnya, Siswanto menjelaskan ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi oleh pengendalian internal yang efektif, antara lain *focused on strategic control Points* adalah sistem pengendalian sebaiknya dipusatkan pada bidang yang strategis atau yang paling banyak memungkinkan terjadinya penyimpangan dari standar serta yang memunculkan kerugian yang paling besar. Kinerja pegawai merupakan aspek strategis dalam Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur karena menjadi salah satu pilar keberhasilan pencapaian organisasi.

2.3.3. Keterkaitan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem pelaporan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks ini, Akuntabilitas merujuk pada kewajiban Instansi Pemerintah untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan mengungkapkan segala tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang telah dilakukan kepada publik atau pihak yang berwenang. Sistem pelaporan menjadi salah satu alat utama dalam menjalankan Akuntabilitas tersebut.

beberapa poin yang menjelaskan keterkaitan antara sistem pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah:

1. Transparansi dan Pengawasan Publik.

Melalui sistem pelaporan yang baik dan transparan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana instansi pemerintah mengelola anggaran dan menjalankan program-programnya. Laporan yang jelas dan terbuka memungkinkan publik untuk memantau serta memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja pemerintah. Sistem pelaporan yang lengkap dan terstruktur mendukung pengawasan dari pihak eksternal seperti DPR, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya, yang berfungsi untuk memastikan bahwa instansi pemerintah menjalankan tugasnya dengan efisien dan sesuai dengan peraturan.

2. Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban.

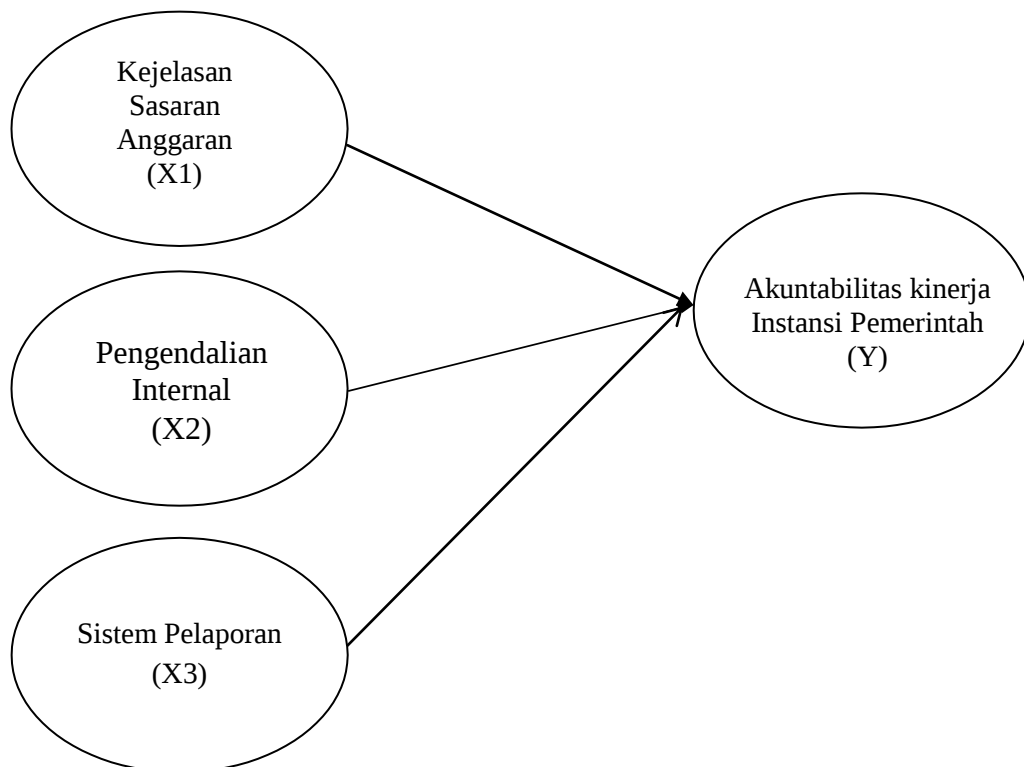
Dengan adanya pelaporan yang sistematis, instansi pemerintah dapat menunjukkan hasil dari program-program yang telah dilaksanakan,

termasuk pencapaian tujuan dan penggunaan anggaran. Hal ini memungkinkan adanya evaluasi kinerja yang objektif.

3. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data.

Sistem pelaporan yang menyediakan data kinerja yang terperinci mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pemerintahan.

Data ini bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan atau melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program.



Gambar 2.2.
Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan diteliti dan diuji kebenarannya. Kebenaran dari hipotesis tersebut harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2018). Sebelum mendapatkan fakta – fakta yang benar, sebelumnya mereka akan membuat dugaan sementara, masalah atau peristiwa yang menjadi titik permasalahan tersebut. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian tersebut rumusan hipotesis penelitian yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
4. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang tidak dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu dalam kehidupan manusia. Umumnya menyelidiki permukaan saja, dengan demikian memerlukan waktu yang lebih singkat (AzuarJuliandi,Irfan,Saprial Manurung 2014:58).

Penelitian ini bersifat asosiatif, penelitian asosiatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui hubungan di antara dua atau lebih variabel dengan maksud untuk menemukan variabel penting mana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari tahu dan menganalisis hubungan diantara variabel-variabel yang terdiri dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), variabel Pengendalian Internal (X2), variabel Sistem Pelaporan (X3), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebagai variabel terikat/ dependen. Peneliti menggunakan angket atau kuesioner sebagai alat pengumpul datanya. Data kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari.

3.2. Definisi Operasional.

Defenisi Operasional adalah penjelasan secara spesifik mengenai cara-cara bagaimana peneliti mengukur dan mencari variabel yang peneliti inginkan. Variabel adalah Objek penelitian yang akan di teliti oleh peneliti yang mempunyai berbagai macam nilai. Variabel biasanya di bedakan menjadi dua (2) yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

1. Variabel Dependen.

Variabel dependen (*dependent variables*) atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf *y*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

2. Variabel Independen.

Variabel independen (*independent variables*) disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf *x*. Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yang tergolong dalam variabel independen yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Pengendalian Internal (X2), dan Sistem Pelaporan (X3).

Tabel 3.1
Definisi Operasional Tabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Penelitian
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Nadirsyah, dkk (2012 : 64) Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut..	1. Akuntabilitas proses 2. Akuntabilitas Program 3. Akuntabilitas kebijakan	Ordinal
2	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Sejauh mana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik, sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan (bhakti,dkk 2015:32)	1. Pertanggungjawaban 2. Perencanaan 3. Bidang Kegiatan 4. Produk 5. Tingkat Pengendalian	Ordinal
3	Pengendalian Internal (X2)	Struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Mulyadi (2016:129)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Aktivitas Pemantauan	Ordinal
4	Sistem Pelaporan (X3)	Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan(Gayatri, dkk., 2016 : 44).	1. Penyebab terjadinya penyimpangan 2. Tindakan yang diambil 3. Lamanya waktu koreksi	Ordinal

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Medan tepatnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, di Jalan Kapten Maulana Lubis, No. 2, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Januari

Tabel 3.2
Pelaksanaan Waktu Penelitian.

No	Tahapan Penelitian	Oktober 2024				November 2024				Desember 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Pengajuan Judul																							
2.	Penyusunan Proposal																							
3.	Seminar Proposal																							
4.	Pengumpulan Data																							
5.	Pengolahan Data																							
6.	Penulisan Laporan																							
7.	Bimbingan Skripsi																							
8.	Penyelesaian Laporan																							
9.	Sidang Meja Hijau																							

3.4. Populasi dan Sampel.

3.4.1. Populasi

Menurut Azuar Juliandi, Irfan, Saprinah Manurung (2014:58), populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah wilayah Penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebanyak 40 orang pegawai yang

bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dijelaskan dalam Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Daftar Jumlah Pegawai

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala BKAD	1
2	Sekretaris BPKAD	1
3	Sub Bagian Umum	5
4	Sub Bagian Aset dan Investasi	3
5	Sub Bagian Penyusunan Program	3
6	Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi	3
7	Sub Bidang Belanja Langsung	4
8	Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	4
9	Bidang Perbendaharaan	3
10	Sub Bidang Gaji	3
11	Sub Bidang Verifikasi dan Kas	3
12	Sub Bidang Akuntansi	3
13	Sub Bidang Pelaporan	4
	Jumlah	40

3.4.2. Sampel.

Menurut Azuar Juliandi,Irfan,Saprinal Manurung (2014:58). Sampel merupakan wakil-wakil dari populasi. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non- probability dengan teknik purposive sampling. Non-probability sampling adalah pengambilan sampel dimana tidak semua anggota/elemen pupulasi berpeluang sama untuk dijadikan sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Sampling Jenuh*.

Sampling jenuh yaitu suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Apabila jumlah responden kurang dari 100 responden, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jadi jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 40 responden.

3.5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu kuisioner. Kuisioner adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dibuat berdasarkan indikator- indikator dari variabel penelitian yang diberikan kepada responden (Widodo, 2019). Penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung ataupun melalui angket yang sudah disediakan oleh peneliti agar di jawab oleh Para pegawai di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Medan. Dalam memperoleh data- data penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer).

Agar memudahkan pengumpulan data penelitian ini menggunakan skala peringkat terperinci (*itemized rating scale*). Skala ini memberikan penjelasan terbaik mengenai aspek-aspek yang sulit diukur, sehingga sering digunakan dengan dasar panduan sesuai dengan keperluan dalam penelitian (Sekaran & Bouge, 2017). Dalam pengukurannya setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pernyataan dengan pemberian skor sebagai berikut:

Tabel 3.4
Skala Penilaian Untuk Pertanyaan Positif

No	Jenis Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sebelum melakukan pengumpulan data, analisis data dan uji hipotesis terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu melakukan uji instrument penelitian. dalam penelitian ini penggunaan instrument menggunakan evaluasi model pengukuran (outer model), berupa uji validitas dan uji realibilitas. Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel).

3.5.1. Uji Validasi.

Validasi adalah tingkat dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Sebelum instrument terbukti valid tidak akan bisa digunakan dalam pengumpulan data, karena akan menyebabkan data yang dihasilkan akan diragukan. Instrument yang valid adalah instrument yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiono, 2013).

Apabila korelasi positif dan $r > 0,3$ maka butir instrument tersebut dinyatakan valid. Butir pernyataan yang tidak valid tidak diikutsertakan dalam uji hipotesis. Dalam pengujian kualitas pada responden, apakah data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Maka dilakukan tahapan pengujian data dengan menggunakan uji validasi sebagai ukuran untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variabel penelitian (Juliadi et.al, 2014).

3.5.2. Uji Reabilitas.

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat atau mengukur apakah instrument penelitian merupakan instrument yang handal dan dapat dipercaya. (Juliadi, dkk. 2014). Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach 'alfa* dimana nilainya harus $>0,60$ (Ghozali, 2021).

3.6. Teknik Analisis Data.

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis data deskriptif adalah suatu metode untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis masalah objek yang diteliti, serta membandingkan dengan pengertian yang ada. Metode ini berusaha untuk mendefinisikan masalah secara sistematis dan akurat, dengan memerhatikan fakta dan sifat objek penelitian, adapun pengujian dalam metode ini adalah sebagai berikut:

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif.

Statistik deskriptif ialah suatu Teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan situasi objek penelitian apa adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan tertentu berdasarkan semua data yang telah terkumpul. Berdasarkan pengertian di atas, analisis data dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang situasi yang terjadi atau berlaku pada objek penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Ghozali (2016:19) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dan memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.

Untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor actual dengan skor ideal. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden akan didasarkan pada nilai rata-rata skor jawaban yang selanjutnya akan dikategorikan pada rentang skor berikut: Skor minimum = 1 Skor maksimum = 5 Lebar skala = $(5 - 1) : 5 = 0,8$.

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Skala

Interval Skala	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Baik
1,81 – 2,60	Tidak Baik
2,61 – 3,40	Cukup Baik
3,41 – 4,20	Baik
4,21 – 5,00	Sangat Baik

Sumber : Ridwan (2013:65)

3.6.2. Uji Hipotesis.

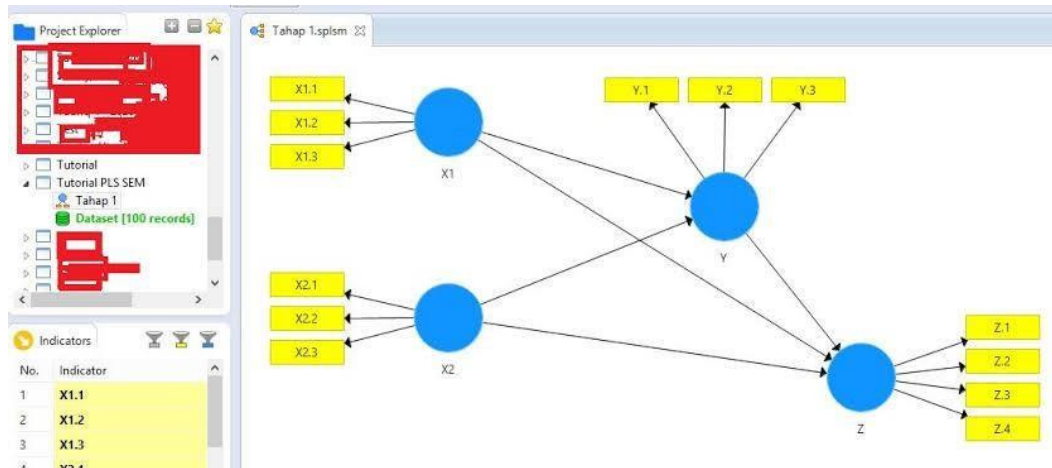
Menurut Juliandi (2015) hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis diperoleh dengan memprediksi penelitian terdahulu sebagai referensi dalam pembuktian uji hipotesis berguna untuk mengetahui apakah secara parsial memiliki hubungan antara X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y. ada dua jenis koefisien yang dapat dilakukan dengan uji t.

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t-statistik dan nilai p-value. Variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila t-statistik $> 1,99$ dan p-value $< 0,05$ (Dahrani et al., 2022).

3.6.2.1. Analisis SEM (Structural Equation Modeling)

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS 4 yang dijalankan dengan media computer. PLS (partial least square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).

Menurut (Ghozali, I., & Hengky, 2015) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat *soft modelling* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (di bawah 100 sampel). Selain itu SEM mampu menguji penelitian yang kompleks dan banyak variabel secara simultan. SEM dapat menyelesaikan analisis dengan satu kali estimasi dimana yang lain diselesaikan dengan beberapa persamaan regresi. SEM dapat melakukan analisis faktor, regresi dan jalur sekaligus. Setelah dilakukan uji coba terbatas melalui uji validitas dan reliabilitas, maka terdapat indikator dari item pertanyaan yang dibuang, atau tidak diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. Maka pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver.4 for Windows.



Gambar 3.1. Model Struktural PLS Penelitian

3.6.2.2. Evaluasi Outer Model (Measurment Model)

Evaluasi outer model dalam PLS-SEM dilakukan untuk menilai validitas dari reliabilitas model (Ghozali, 2021). Dengan menggunakan instrument yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel (Sugiono, 2017). Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa statistik:

1. *Convergent Validity*, berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkoreasi tinggi (Ghozali, 2021). Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,70$ dengan konstruk yang diukur. (Ghozali, I., & Hengky, 2015) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.
2. *Diskriminant Validity*, merupakan model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. (Ghozali, I., & Hengky, 2015) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan

hasilnya lebih konservatif disbanding dengan composite reliability.

Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50.

3. *Composite Reliability*, merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *view latent variable coefficient*. Nilai CR 0,60 - 0,70 masih dapat diterima (Ghozali, 2021).
4. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas yang dilakukan, merupakan hasil dari *composite reliability*. Nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan harus lebih besar dari 0,7 untuk dianggap memenuhi standar reliabilitas. Jika nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,7, maka perlu dilakukan penghapusan item yang tidak relevan atau penyaringan ulang untuk memastikan reliabilitas data yang lebih baik.

3.6.2.3. Evaluasi Inner Model (Struktural Model).

Inner Model atau model struktural adalah bagian pengujian hipotesis yang digunakan dalam menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten eksogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Analisis model struktural ini akan menganalisis hubungan antar variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat serta hubungan diantaranya (Jualiandi, A., Irfan, 2014). Pengujian Hipotesis dilakukan melalui *direct effect* dan *indirect effect*, yaitu:

1. R-Square

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya. Ini berguna untuk memprediksi apakah model tersebut baik/buruk.

Kriteria dalam penilaian R-Square adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai R-Square = 0,75 maka model adalah kuat.
2. Jika nilai R-Square = 0,50 maka model adalah sedang.
3. Jika nilai R-Square = 0,25 maka model adalah lemah.

2. T-Statistic

T-Statistics merupakan suatu nilai yang digunakan untuk melihat tingkat signifikansi pada pengujian hipotesis dengan cara mencari nilai t-statistics melalui prosedur bootstrapping. Pada pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika nilai T-statistics $> 1,96$ sedangkan jika nilai T-statistics $< 1,96$ maka dianggap tidak signifikan (Ghozali, 2016).

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada tabel Coefficients. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

Adapun kriteria dari uji T-Statistics menurut Ghozali adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan uji t $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan uji t $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3. P-Value

P-Value merupakan sebuah indeks dalam statistik yang menunjukkan probabilitas suatu hasil penelitian yang terjadi hanya karna kebetulan. Dengan kata lain P-Value membantu untuk menentukan apakah hipotesis yang diuji memiliki bukti cukup kuat atau tidak. Nilai P berkisar antara 0 hingga 1. P-Value yang kecil umumnya dibawah 0,05 menunjukkan bahwa ada bukti kuat yang menolak hipotesis nol sehingga lebih meyakinkan ada efek yang signifikan dari variabel yang diuji. Dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antar variabel X terhadap Variabel Y, peneliti menggunakan T-Statistics dan P-Value dalam pengujiannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Dalam penelitian ini penulis mengelola angket dalam bentuk data yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel (X1), 10 pernyataan untuk variabel (X2), 6 pernyataan untuk variabel (X3) dan 6 pernyataan untuk variabel (Y). variabel (X1) yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, variabel (X2) yaitu Pengendalian Internal, variabel (X3) Sistem Pelaporan, variabel (Y) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1.1. Karakteristik Responden.

4.1.1.1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pria	19	52,5
Wanita	13	47,5
Total	32	100
Kuesioner Kembali	32	

Sumber: data primer diolah 2025

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 32 orang responden, sebanyak 19 orang dengan persentase 52,5% berjenis kelamin laki-laki dan 13 orang dengan persentase 47,5% berjenis kelamin perempuan.

4.1.1.2. Karakteristik Berdasarkan Usia.

Karakteristik responden berdasarkan Usia dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
30-34	5	16
35-39	13	41
40-44	8	25
45-49	3	9
50-54	3	9
Total	32	100

Sumber: data primer diolah 2025

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 32 orang responden, sebanyak 5 orang dengan persentase 16,0% yang berusia 30 – 34 tahun, sebanyak 13 orang dengan persentase 41,0% yang berusia 35-39 tahun, sebanyak 8 orang dengan persentase 25,0% yang berusia 40-44 tahun, sebanyak 3 orang dengan persentase 9% yang berusia 45-49 tahun, sebanyak 3 orang dengan persentase 9% yang berusia 50-54 tahun.

4.1.1.3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan.

Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SMA	1	3
D3	5	16
S1	23	72
S2	3	9
Total	32	100

Sumber: data primer diolah 2025

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 32 orang responden, sebanyak 1 orang dengan persentase 3% pendidikan SMA, sebanyak 5 orang dengan persentase 16,0% pendidikan D3, sebanyak 23 orang dengan persentase 72,0% pendidikan S1, dan sebanyak 3 orang dengan persentase 9% pendidikan S2.

4.1.2. Analisis Variabel Penelitian.

kategori variabel menggambarkan tanggapan responden mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut ini adalah rekapitulasi jawaban responden yang dapat dilihat langsung melalui masing-masing variabel:

4.1.2.1. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran.

Adapun jawaban responden dalam menilai indikator pada variable kejelasan Sasaran Anggaran dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4 Hasil Jawaban Responden Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

No Item	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	20	63	12	37	0	0	0	0	0	0	32	100
2	15	47	7	22	5	16	5	16	0	0	32	101
3	12	37	20	63	0	0	0	0	0	0	32	100
4	10	31	20	63	0	0	2	6	0	0	32	100
5	10	31	10	31	12	38	0	0	0	0	32	100
6	11	34	5	16	10	31	4	13	2	6	32	100
7	17	53	15	47	0	0	0	0	0	0	32	100
8	14	44	11	34	5	16	2	6	0	0	32	100
9	12	38	11	34	9	28	0	0	0	0	32	100
10	15	47	10	31	7	22	0	0	0	0	32	100

Sumber: Data primer diolah 2025

Dari tabel diatas menjelaskan variasi dalam jawaban responden terhadap variabel kejelasan Sasaran Anggaran, Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai data tersebut:

1. Dari pernyataan Sasaran Anggaran satuan kerja, Sebagian besar responden 63% menyatakan sangat setuju, 37% menjawab setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0 % menjawab tidak setuju, dan 0 % menjawab sangat tidak setuju.
2. Dari pernyataan Spesifikasi Anggaran , Sebagian besar responden 47% menjawab sangat setuju, 22% menjawab setuju, 16% menjawab kurang setuju, 16% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

3. Dari pernyataan keahlian dan pengetahuan, Sebagian besar responden 63% menjawab setuju, 37% menjawab sangat setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
4. Dari pernyataan partisipasi penyusunan anggaran, Sebagian besar responden 63% menjawab setuju, 31% menjawab sangat setuju, 6% menjawab tidak setuju, 0% menjawab kurang setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
5. Dari pernyataan penganggaran pelaksanaan, Sebagian besar responden 38% menjawab kurang setuju, 31% menjawab sangat setuju, 31% menjawab setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
6. Dari pernyataan mengetahui kepentingan, Sebagian besar responden 34% menjawab sangat setuju, 31% menjawab kurang setuju, 16% menjawab setuju, 13% menjawab tidak setuju, dan 6% menjawab sangat tidak setuju.
7. Dari pernyataan Kejelasan Rencana Kerja, Sebagian besar responden 53% menjawab sangat setuju, 47% menjawab setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
8. Dari pernyataan mengetahui secara luas, Sebagian besar responden 44% menjawab sangat setuju, 34% menjawab setuju, 16% menjawab kurang setuju, 6% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
9. Dari pernyataan anggaran yang dipertimbangkan, Sebagian besar responden 38% menjawab sangat setuju, 34% menjawab setuju, 28% kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
10. Dari pernyataan kinerja kegiatan, Sebagian besar responden 47% menjawab sangat setuju, 31% menjawab setuju, 22% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

4.1.2.2. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Pengendalian Internal.

Adapun jawaban responden dalam menilai indikator pada variable Pengendalian Internal dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5 Hasil Jawaban Responden Variabel Pengendalian Internal

No Item	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	5	16	15	47	2	6	8	25	2	6	32	100
2	25	78	7	22	0	0	0	0	0	0	32	100
3	10	31	12	38	10	31	0	0	0	0	32	100
4	10	31	10	31	6	19	6	19	0	0	32	100
5	15	47	5	16	10	31	2	6	0	0	32	100
6	15	47	15	47	2	6	0	0	0	0	32	100
7	13	41	10	31	7	22	2	6	0	0	32	100
8	12	38	12	38	5	15	3	9	0	0	32	100
9	17	53	11	34	4	13	0	0	0	0	32	100
10	15	47	10	31	7	22	0	0	0	0	32	100

Sumber: data primer diolah 2025

1. Dari pernyataan pengendalian untuk pengecekan, Sebagian besar responden 47% menyatakan setuju, 25% menjawab tidak setuju, 16% menjawab sangat setuju, 6% menjawab kurang setuju, dan 6% menjawab sangat tidak setuju.
2. Dari pernyataan pengendalian secara berkala, Sebagian besar responden 78% menyatakan sangat setuju, 22% menjawab setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0 % menjawab tidak setuju, dan 0 % menjawab sangat tidak setuju.
3. Dari pernyataan pimpinan instansi menetapkan disiplin, Sebagian besar responden 38% menyatakan setuju, 31% menjawab sangat setuju, 31% menjawab kurang setuju, 0 % menjawab tidak setuju, dan 0 % menjawab sangat tidak setuju.

4. Dari pernyataan pemerintah mampu menjelaskan, Sebagian besar responden 31% menyatakan sangat setuju, 31% menjawab setuju, 19% menjawab kurang setuju, 19% menjawab tidak setuju, dan 0 % menjawab sangat tidak setuju.
5. Dari pernyataan pemerintah telah menyusun kompetensi, Sebagian besar responden 47% menyatakan sangat setuju, 31% menjawab kurang setuju, 16% menjawab setuju, 6% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
6. Dari pernyataan pemerintah menyelenggarakan pelatihan, Sebagian besar responden 47% menyatakan sangat setuju, 47% menjawab setuju, 6% menjawab kurang setuju, 0 % menjawab tidak setuju, dan 0 % menjawab sangat tidak setuju.
7. Dari pernyataan interaksi secara insentif, Sebagian besar responden 41% menyatakan sangat setuju, 31% menjawab setuju, 22% menjawab kurang setuju, 6% menjawab tidak setuju, dan 0 % menjawab sangat tidak setuju.
8. Dari pernyataan pembentukan struktur organisasi, Sebagian besar responden 38% menyatakan sangat setuju, 38% menjawab setuju, 15% menjawab kurang setuju, 9% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
9. Dari pernyataan instansi pemerintah menggunakan mekanisme, Sebagian besar responden 53% menyatakan sangat setuju, 34% menjawab setuju, 13% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

10. Dari pernyataan instansi mampu menerapkan prinsip, Sebagian besar responden 47% menyatakan sangat setuju, 31% menjawab setuju, 22% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

4.1.2.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Sistem Pelaporan.

Adapun jawaban responden dalam menilai indikator pada variable Sistem Pelaporan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.6 Hasil Jawaban Responden Variabel Sistem Pelaporan

No Item	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	23	72	9	28	0	0	0	0	0	0	32	100
2	11	34	8	25	13	41	0	0	0	0	32	100
3	20	63	10	31	2	6	0	0	0	0	32	100
4	18	56	10	31	4	13	0	0	0	0	32	100
5	20	63	12	37	0	0	0	0	0	0	32	100
6	22	69	10	31	0	0	0	0	0	0	32	100

Sumber: data primer diolah 2025

1. Dari pernyataan laporan keuangan disajikan dengan lengkap, Sebagian besar responden 72% menyatakan sangat setuju, 28% menjawab setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
2. Dari pernyataan instansi memberikan informasi untuk mengoreksi, Sebagian besar responden 41% menyatakan kurang setuju, 34% menjawab sangat setuju, 25% menjawab setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

3. Dari pernyataan informasi telah disajikan, Sebagian besar responden 63% menyatakan sangat setuju, 31% menjawab setuju, 6% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
4. Dari pernyataan informasi keuangan, Sebagian besar responden 56% menyatakan sangat setuju, 31% menjawab setuju, 13% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
5. Dari pernyataan informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, Sebagian besar responden 63% menyatakan sangat setuju, 37% menjawab setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
6. Dari pernyataan pelaporan kinerja telah sesuai undang-undang , Sebagian besar responden 69% menyatakan sangat setuju, 31% menjawab setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

4.1.2.4. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun jawaban responden dalam menilai indikator pada variable Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Jawaban Responden Varibel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No Item	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	21	66	11	34	0	0	0	0	0	0	32	100
2	14	44	18	56	0	0	0	0	0	0	32	100
3	26	81	6	19	0	0	0	0	0	0	32	100
4	20	62	12	38	0	0	0	0	0	0	32	100
5	10	31	14	44	8	25	0	0	0	0	32	100
6	24	75	8	35	0	0	0	0	0	0	32	100

Sumber: data Primer diolah 2025

1. Dari pernyataan visi dan misi program instansi, Sebagian besar responden 66% menyatakan sangat setuju, 34% menjawab setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
2. Dari pernyataan pelaporan kinerja, Sebagian besar responden 56% menyatakan setuju, 44% menjawab sangat setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
3. Dari pernyataan dilakukan analisis secara terukur, Sebagian besar responden 81% menyatakan sangat setuju, 19% menjawab setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
4. Dari pernyataan pembuatan laporan kegiatan, Sebagian besar responden 62% menyatakan sangat setuju, 38% menjawab setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

5. Dari pernyataan prosedur telah selaras dengan renstra, Sebagian besar responden 44% menyatakan setuju, 31% menjawab sangat setuju, 25% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.
6. Dari pernyataan telah dilakukan pengukuran kinerja, Sebagian besar responden 75% menyatakan sangat setuju, 35% menjawab setuju, 0% menjawab kurang setuju, 0% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

4.2. Analisis Data.

4.2.1. Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

4.2.1.1. Convergent Validity

Convergent validity dalam model pengukuran dengan pendekatan reflektif indikator dinilai berdasarkan hubungan antara skor item atau skor komponen dengan skor konstruk, yang diukur melalui Loading Factor menggunakan metode PLS. Sebuah indikator reflektif dianggap memiliki validitas yang tinggi jika korelasinya dengan konstruk yang diukur lebih dari 0,7. Berdasarkan hasil analisis data terkait *Convergent validity*, penilaian terhadap indikator-indikator dari setiap variabel dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Convergent Validity* Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran.

Dalam variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki 10 indikator, berdasarkan analisis diperoleh nilai *Convergent validity* melalui loading factor yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Convergent Validity Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Indikator	Loading Factor	Role of Trumb	Keterangan
KSA1	0,766	0,7	Valid
KSA2	0,882	0,7	Valid
KSA3	0,752	0,7	Valid
KSA4	0,899	0,7	Valid
KSA5	0,775	0,7	Valid
KSA6	0,728	0,7	Valid
KSA7	0,806	0,7	Valid
KSA8	0,833	0,7	Valid
KSA9	0,738	0,7	Valid
KSA10	0,859	0,7	Valid

Sumber: Data diolah PLS 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai loading factor setiap indikator variabel kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai diatas 0,7. Yang artinya setiap indikator dapat dinyatakan valid.

2. Convergent Validity Variabel Pengendalian Internal.

Dalam variabel Pengendalian Internal memiliki 10 indikator, berdasarkan analisis diperoleh nilai *Convergent validity* melalui loading factor yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Convergent Validity Variabel Pengendalian Internal

Indikator	Loading Factor	Role of Trumb	Keterangan
PI1	0,884	0,7	Valid
PI2	0,883	0,7	Valid
PI3	0,752	0,7	Valid
PI4	0,754	0,7	Valid
PI5	0,840	0,7	Valid
PI6	0,815	0,7	Valid
PI7	0,802	0,7	Valid
PI8	0,735	0,7	Valid
PI9	0,824	0,7	Valid
PI10	0,791	0,7	Valid

Sumber: Data diolah PLS 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai loading factor setiap indikator variabel Pengendalian Internal memiliki nilai diatas 0,7. Yang artinya setiap indikator dapat dinyatakan valid.

3. *Convergent Validity* Variabel Sistem Pelaporan.

Dalam variabel Sistem Pelaporan memiliki 6 indikator, berdasarkan analisis diperoleh nilai *Convergent validity* melalui loading factor yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 *Convergent Validity* Variabel Sistem Pelaporan

Indikator	Loading Factor	Role of Trumb	Keterangan
SP1	0,819	0,7	Valid
SP2	0,848	0,7	Valid
SP3	0,739	0,7	Valid
SP4	0,807	0,7	Valid
SP5	0,895	0,7	Valid
SP6	0,851	0,7	Valid

Sumber:*Data diolah PLS 2025*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai loading factor setiap indikator variabel Sistem Pelaporan memiliki nilai diatas 0,7. Yang artinya setiap indikator dapat dinyatakan valid.

4. *Convergent validity* Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki 6 indikator, berdasarkan analisis diperoleh nilai *Convergent validity* melalui loading factor yang dapat dilihat pada tabel berikut:

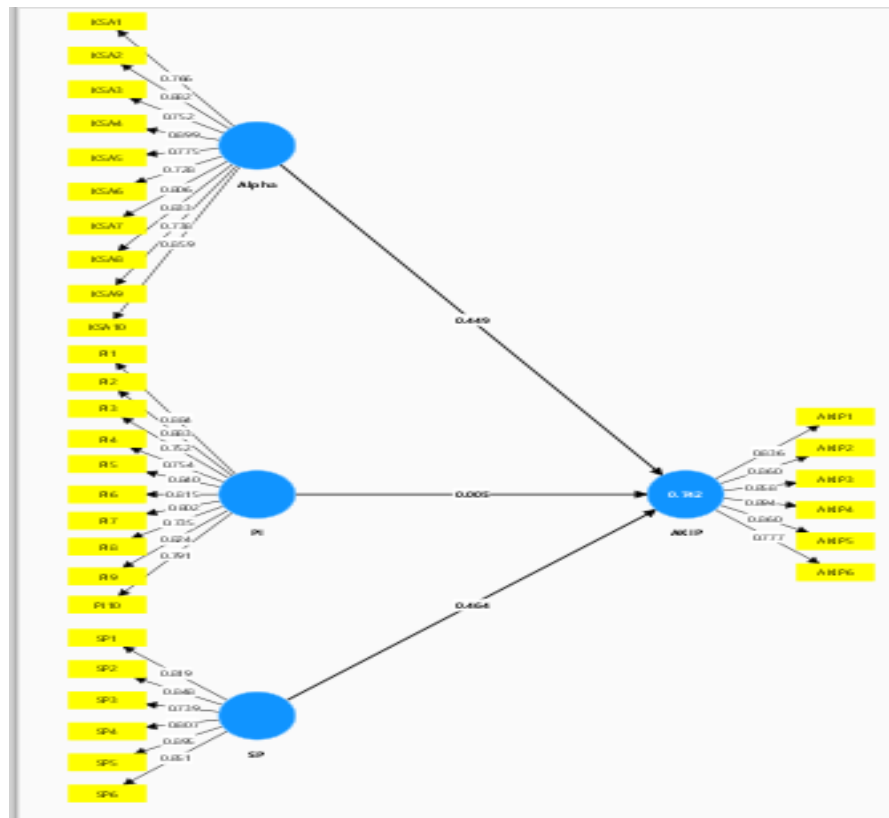
Tabel 4.11 *Convergent Validity* Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator	Loading Factor	Role of Trumb	Keterangan
AKIP1	0,836	0,7	Valid
AKIP2	0,860	0,7	Valid
AKIP3	0,858	0,7	Valid
AKIP4	0,894	0,7	Valid
AKIP5	0,860	0,7	Valid
AKIP6	0,777	0,7	Valid

Sumber:*Data diolah PLS 2025*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai loading factor setiap indikator variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai diatas 0,7. Yang artinya setiap indikator dapat dinyatakan valid.

Nilai dari *Convergent validity* juga dapat dilihat melalui gambar Outer Loading dibawah ini:



Gambar 4.1 Outer Loading

Tabel 4.12 (Penjelasan angka dari gambar 4.1)

KSA1	0,766	PI1	0,884	SP1	0,819	AKIP1	0,836
KSA2	0,882	PI2	0,883	SP2	0,848	AKIP2	0,860
KSA3	0,752	PI3	0,752	SP3	0,739	AKIP3	0,858
KSA4	0,899	PI4	0,754	SP4	0,807	AKIP4	0,894
KSA5	0,775	PI5	0,840	SP5	0,895	AKIP5	0,860
KSA6	0,728	PI6	0,815	SP6	0,851	AKIP6	0,777
KSA7	0,806	PI7	0,802				
KSA8	0,833	PI8	0,735				
KSA9	0,738	PI9	0,824				
KSA10	0,859	PI10	0,791				

4.2.1.2. *Discriminant Validity*

Dalam pengujian Discriminant Validity yaitu menggunakan Avarage Extracted (AVE). Adapun parameter cross loading dalam menilai Avarage Variance Extracted untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-masing indikator kontruk pada setiap variabel direkomendasikan lebih besar dari 0,50 ($>0,50$) (Ghozali dan Latan, 2012;75). Berikut hasil analisis Discriminant Validity.

Tabel 4.13 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Avarage Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,649	Valid
Pengendalian Internal	0,655	Valid
Sistem Pelaporan	0,685	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah	0,720	Valid

Sumber: Data diolah PLS 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh kontruk pada masing-masing variabel memiliki nilai Avarage Variance Extracted (AVE) $> 0,50$. Maka seluruh kontruk memenuhi syarat dalam uji discriminant validity, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis berikutnya.

4.2.1.3. *Composite Reability*

Dalam melakukan uji reabilitas bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Penggunaan composite reliability dilakukan untuk menguji reabilitas suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012:75). Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability $> 0,6$. Berikut nilai Composite Reliability dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 4.14 *Composite Reability*

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
X1 Kejelasan Sasaran Anggaran	0,949	Valid
X2 Pengendalian Internal	0,950	Valid
X3 Sistem Pelaporan	0,929	Valid
Y Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,939	Valid

Sumber: Data diolah PLS 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variabel memiliki nilai composite reliabiity $> 0,60$. Maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji composite reliability, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya.

Construk reliability and validiy jugat dapat dilihat melalui metode lain denga cara melihat nilai *Cronbach Alpha*. Indikator dinyatakan memenuhi *Construk reliability and validiy* apabila nilai dari *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 (Juliandi, 2018). Berikut nilai *Cronbach Alpha* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15 Cronbach Alpha

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
X1 Kejelasan Sasaran Anggaran	0,940	Valid
X2 Pengendalian Internal	0,941	Valid
X3 Sistem Pelaporan	0,908	Valid
Y Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.922	Valid

Sumber:*Data diolah PLS 2025*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6. Yang artinya semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai validitas yang tinggi.

4.2.2. Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

4.2.2.1. Uji R-Square

Pengujian R-square digunakan untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Besarnya nilai R-square dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Uji R-Square

Variabel	R-Square
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,742

Sumber:*Data diolah PLS 2025*

Dari tabel diatas diperoleh nilai R sebesar 0,764 yang artinya angka ini mengidentifikasi kemampuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dipengaruhi oleh variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan sistem Pelaporan dengan kontribusi sebesar 76,4%, dan sisanya 23,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercakup pada penelitian ini. Nilai R

lebih besar dari 0,75 yang artinya bahwa hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki hubungan yang kuat.

4.2.2.2. Uji Hipotesis.

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t-statistik dan nilai p-value. Variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila t-statistik $> 1,99$ dan p-value $< 0,05$ (Dahrani et al., 2022). Berikut ini adalah hasil pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Smart PLS versi 4:

Tabel 4.17 T-Statistic dan P-Value

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Standart Deviation	T- Statistic	P- Value
KSA-> AKIP	0,449	0,467	0,190	2,362	0,018
PI->AKIP	0,005	0,010	0,133	0,037	0,971
SP->AKIP	0,464	0,449	0,201	2.310	0,021

Sumber: Data diolah PLS 2025

Berdasarkan tabel diatas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,449. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistik $2,362 > 1,96$ dan memiliki P-Value $0,018 < 0,05$. Berarti Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Medan.
2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,005. Pengaruh tersebut

mempunyai nilai probabilitas t- statistik $0,037 < 1,96$ dan memiliki nilai p-value sebesar $0,971 > 0,05$, berarti Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Medan.

3. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,449. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistik $2,310 > 1,96$ dan memiliki p-value $0,021 < 0,05$. Berarti Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Medan.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penelitian memperlihatkan jika kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai p-value adalah 0,018. Sehingga, hipotesis yang menyatakan jika kejelasan sasaran anggaran secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diterima. Sebab, nilai p-value $< 0,05$ mengindikasikan jika pengaruh ini tidak hanya ada, tetapi juga signifikan secara statistik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Jaka Darmawan (2020) menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

4.3.2. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar 0,971. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t- statistik $0,037 < 1,96$ dan memiliki nilai p- value sebesar $0,971 > 0,05$, sehingga H_2 tidak diterima. Yang artinya tidak berpengaruh signifikan.

Pengendalian internal seringkali hanya dijalankan secara administratif dan simbolik, bukan sebagai alat manajerial yang aktif mengarahkan kinerja. Banyak instansi hanya menyusun dokumen pengendalian seperti SOP, peta risiko, atau rencana tindak pengendalian, tetapi tidak melaksanakannya secara efektif dalam praktik. Alasan mengapa pengendalian internal tidak selalu memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

1. Fokus pada Prosedur: Pengendalian internal sering kali lebih fokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan daripada pada hasil akhir. Jika pengendalian internal terlalu menekankan pada prosedur, hal ini dapat mengabaikan pencapaian kinerja yang sebenarnya.
2. Birokrasi yang Berlebihan: Pengendalian internal yang terlalu ketat dapat menciptakan birokrasi yang menghambat inovasi dan responsivitas. Dalam beberapa kasus, ini dapat menyebabkan instansi pemerintah gagal mencapai kinerja optimal.

3. Kurangnya Indikator Kinerja: Jika sistem pengendalian internal tidak dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, maka akan sulit untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian tersebut dalam meningkatkan akuntabilitas.
4. Keterbatasan Sumber Daya: Instansi pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan dalam sumber daya, baik manusia maupun finansial. Hal ini bisa mengakibatkan pengendalian internal yang tidak memadai, yang pada gilirannya berdampak negatif pada akuntabilitas.
5. Budaya Organisasi: Budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Jika pegawai tidak merasa bertanggung jawab atau tidak ada insentif untuk berperforma baik, maka kinerja instansi akan terpengaruh.
6. Kepemimpinan yang Lemah: Jika pimpinan instansi tidak menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan pengendalian internal, hal ini dapat menurunkan motivasi pegawai untuk mengikuti prosedur yang ada.

Pengendalian internal membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan integritas tinggi. Namun, banyak ASN di level operasional yang belum memiliki pemahaman mendalam terhadap pentingnya pengendalian internal sebagai alat pencapaian kinerja, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif serta budaya kerja birokrasi yang masih bersifat hierarkis, kurang terbuka, dan enggan menerima evaluasi, menjadi penghambat dalam mengintegrasikan pengendalian internal dengan sistem manajemen kinerja.

Dengan demikian, meskipun pengendalian internal memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berbagai faktor juga dapat menghambat efektivitasnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Kumenit & Credose Pingkan (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

4.3.3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga memperlihatkan jika sistem pelaporan memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan koefisien jalur sebesar 0,464. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistik $2,310 > 1,96$ dan memiliki p-value $0,021 < 0,05$, sehingga H_3 diterima. Hal ini berarti Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ni Made Meisi dan Agus Suardika (2020), Sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Hasil ini dapat membantu instansi dalam perencanaan, meningkatkan Akuntabilitas dan meningkatkan stabilitas finansial.
2. Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi pada suatu instansi terutama pemerintah serta meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

5.2. Saran.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pegawai BPKAD Kota Medan diharapkan untuk terus mempertahankan dan memaksimalkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih optimal untuk masa yang akan datang
2. Bagi Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat mempertahankan kejelasan sasaran anggaran dan perlu adanya perbaikan dalam sistem pengendalian internal. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.
3. Penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel yang diteliti. Dengan mempertimbangkan variabel- variabel lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5.3. Keterbatasan Penelitian.

Peneliti memiliki keterbatasan eksplorasi pada objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA.

- Adolph, R. (2016). *Accounting and Control*. Rob Dewey.
- Aisyah, S., Astuty, W., & Hafsah, D. (2019). Pengaruh Komite Audit Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengendalian Intern Pt. Inalum. *Jakk (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer)* , 2(1), 81–98.
- Ali Zakiyudin, M., & Suyanto, S. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 89–96. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i01.99>
- Alpi, M. F. (2019). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 355–364.
- Anggraini, L. (2017). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (Study Kasus SKPD di Prov. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 670–684.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13(1), 15–27.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 44–62. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10944>
- Auzan, R. H., Nasir, A., & SilaFlahi, S. P. (2017). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip). *JOM Fekon*, 4(1), 1122–1136.
- Azuar juliandi, Irfan, S. M. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan:UMSU

PRESS.

- Cahyani, N. M. M., & Agus Suardika, A. A. K. (2020). Pengaruh Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 544–571. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.998>
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Dan, K., Sasaran, K., Terhadap, A., & Kinerja, A. (n.d.). *Jurnal Rosiana*.
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19. <https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.989>
- Hafsah, R., & Siregar, H. sakti. (2017). Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Berkelanjutan Bangsa Berbasis Iptek*, 1(1), Hal. 1-10.
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Jaka Darmawan, E. R. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Sistem Pelaporan , Audit Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 1–12.
- Kaltsum, U., & Rohman, A. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kartika, R. D., & Sukamto. (2019). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota Surabaya). *Liability*, Vol.01, No(2), 63–83. <https://m.detik.com>
- Maji, R., Pasolo, F., Yamin Noch, M., & Sonjaya, Y. (2024). SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Keerom. *SEIKO : Journal of Management & Business*,

7(1), 53–68.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.

Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Nainggolan, E. P. (2015). Pengaruh Kualitas Anggaran Dan Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(2), 171–181. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/215>

Pratama, D. A., Hanif, R. A., & Sari, R. N. (2023). Pengaruh Kompetensi, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap AKIP. ... *Pajak dan Bisnis (Journal of ...)*, 4(1), 31–40. <https://mail.stpi-pajak.ac.id/jurnal/index.php/JPB/article/view/61%0Ahttps://mail.stpi-pajak.ac.id/jurnal/index.php/JPB/article/download/61/56>

Putu ika sawitri dan gayatri. (2021). Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa pada akuntabilitas perangkat desa*, 1, 476–489.

Riswanto, N. (2016). Analysis of Accountability and Transparency of Financial Management on Local Government Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–7. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75336/NATAK_RISWANTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Scenario: Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 43–53.

Sari, E. N. (2014). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 25–54.

Sasaran, K., Dan, A., Pada, K., Perundangan, P., & Purworejo, K. (2018). Heksi kinasih (*Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (StudiEmpiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)*).

Siswiraningtyas, A. N., & Indrawati Yuhertiana. (2021). P Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 113–122. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.379>

Suhartono, E., & Solichin, M. (2006). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. 0274, 1–20.

LAMPIRAN

Lampiran 1: kuisisioner

Kepada Yth.

Di Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai penunjang skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis Mengharap Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk meluangkan waktunya mengisi kuesioner atau daftar pernyataan yang terlampir. Kegiatan Penelitian ini ditujukan untuk kepentingan ilmiah dan daftar pernyataan yang terlampir dalam kuesioner hanya digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data.

Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari auditor dalam pengisian kuesioner. Atas kesediaan waktu dan bantuannya diucapkan banyak terimakasih.

Hormat Saya

Dafa Fadhila

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : _____

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Umur : ☐ < 25 ☐ 26-35
☐ 36-55 ☐ >55

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA/Sederajat ☐ S2
☐ S1 ☐ S3

Pengalaman Kerja : ☐ 1-3 Tahun ☐ 3-5 Tahun
☐ >5 Tahun

*Berilah tanda Centang pada kotak yang tersedia.

Cara Pengisian Kuesioner

Pernyataan-pernyataan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui pendapat anda tentang faktor faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit. Pada setiap pernyataan telah disediakan bagian 4 poin skala disampingnya dengan keterangan sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Kurang Setuju (KS)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

Anda diminta untuk memberikan jawaban yang tersedia disamping pernyataan sesuai dengan jawaban/keadaan anda dengan cara memberi tanda centang.

Kuisisioner Mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y1)

No	Pernyataan	Penilaian				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Visi dan misi program instansi tempat saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategi organisasi.					
2	Pada Instansi tempat saya bekerja, Pelaporan kinerja telah sepenuhnya ditetapkan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan serta terukur.					
3	Pada Instansi tempat saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.					
4	Pada instansi tempat saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan.					
5	Prosedur penganggaran pada Instansi telah sepenuhnya selaras dengan Renstra dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar menghasilkan <i>outcome</i> yang terukur					
6	Pada Instansi tempat saya bekerja, telah dilakukan Pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja					

Kuisisioner Mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

No	Pernyataan	Penilaian				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Laporan pertanggungjawaban anggaran disusun berdasarkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.					
2	Anggaran yang digunakan benar-benar mendukung tercapainya target/kinerja organisasi.					
3	Dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran.					
4	Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan instansi secara efektif					
5	Antara penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif.					
6	Dapat mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program/kegiatan					
7	Kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefinisikan dengan jelas dan komprehensif.					
8	Dapat mengetahui secara jelas output dan outcome yang harus dicapai pada setiap program dan kegiatan					
9	Anggaran yang dibuat telah mempertimbangkan skala prioritas					
10	Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur					

Kuisisioner Mengenai Pengendalian Internal (X2)

No	Pernyataan	Penilaian				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Pengendalian internal digunakan untuk pengecekan, ketelitian dan keakuratan pada instansi pemerintah					
2	Pengendalian internal secara berkala sangat diperlukan guna mengontrol akuntabilitas kinerja instansi pemerintah					
3	Pimpinan instansi pemerintah telah menetapkan disiplin terhadap kebijakandan prosedur serta memberikan sanksi yang tepat atas penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan perilaku yang ada					
4	Pimpinan instansi pemerintah mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian internal					
5	Pimpinan instansi pemerintah telah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing - masing posisi dalam Instansi Pemerintah serta rutin melakukan review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan					
6	Pimpinan instansi pemerintah menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya					
7	Interaksi secara intensif dilakukan dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program,dan kegiatan					

8	Pembentukan struktur organisasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang undangan					
9	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal					
10	Pimpinan instansi mampu menerapkan prinsip kehati hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima					

Kuisiener Mengenai Sistem Pelaporan (X3)

No	Pernyataan	Penilaian				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Perjanjian dan Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.					
2	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja, telah memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.					
3	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.					
4	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi keuangan pada laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji.					
5	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					

6	Prosedur pelaporan kinerja telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
---	--	--	--	--	--	--

Lampiran 2: Tabulasi Kuisisioner

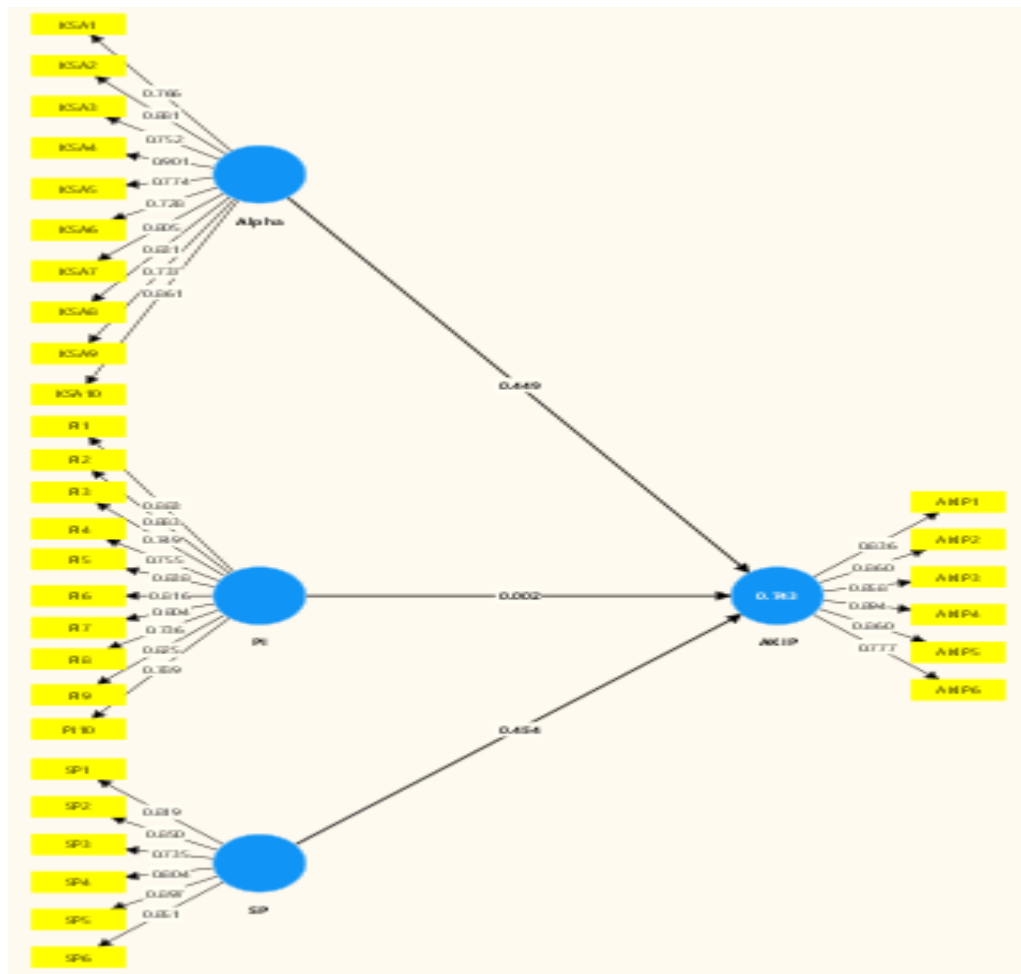
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)						
No.	AKIP1	AKIP2	AKIP3	AKIP4	AKIP5	AKIP6
1.	5	5	4	5	4	4
2.	4	4	4	5	4	5
3.	5	4	4	4	5	5
4.	5	5	5	5	4	5
5.	4	4	4	4	3	4
6.	5	5	5	5	3	4
7.	4	4	4	5	5	4
8.	4	5	4	5	3	5
9.	5	4	5	4	4	4
10.	5	4	5	5	5	4
11.	4	4	5	5	4	5
12.	5	5	4	4	4	5
13.	4	4	5	4	3	4
14.	5	5	5	5	3	5
15.	5	5	5	4	4	4
16.	4	4	4	5	4	5
17.	5	4	5	5	5	5
18.	4	5	4	4	4	5
19.	5	4	5	5	5	4
20.	4	4	5	4	4	5
21.	5	4	5	5	4	5
22.	5	5	4	4	4	4
23.	4	4	5	5	5	5
24.	4	5	4	4	5	4
25.	5	4	5	5	5	4
26.	4	5	4	4	4	5
27.	5	4	5	5	3	5
28.	4	4	5	4	4	5
29.	5	5	5	4	3	4
30.	5	5	4	5	3	4
31	4	4	5	5	4	4
32	5	4	5	4	5	4

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)										
No.	KSA1	KSA2	KSA3	KSA4	KSA5	KSA6	KSA7	KSA8	KSA9	KSA10
1.	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
2.	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5
3.	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4
4.	5	5	5	4	4	3	5	5	5	5
5.	4	3	4	4	3	3	4	5	4	4
6.	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
7.	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5
8.	4	2	4	5	3	5	4	5	4	5
9.	5	4	4	4	4	3	5	3	5	4
10.	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3
11.	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5
12.	5	5	4	4	4	3	5	5	4	3
13.	4	4	5	4	3	3	4	3	5	3
14.	5	2	4	5	3	5	5	3	3	5
15.	5	5	5	4	4	3	5	5	3	4
16.	4	3	4	5	4	5	4	4	4	5
17.	5	4	5	5	5	5	5	4	3	5
18.	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4
19.	5	2	5	5	5	4	5	4	3	5
20.	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4
21.	5	4	5	5	3	5	5	2	5	5
22.	5	2	4	4	4	5	5	5	4	4
23.	4	4	4	2	5	3	4	4	3	5
24.	4	5	4	4	3	2	4	5	3	3
25.	5	4	5	5	5	2	5	4	5	3
26.	4	2	4	4	5	5	4	2	4	4
27.	5	3	4	2	3	5	5	3	5	3
28.	4	5	4	4	5	2	4	4	3	4
29.	5	5	5	4	3	1	5	5	5	3
30.	5	3	4	4	3	2	5	5	3	5
31.	4	5	4	5	4	3	4	3	5	5
32.	5	5	5	4	3	1	4	4	3	4

Pengendalian Internal (X2)										
No.	PI1	PI2	PI3	PI4	PI5	PI6	PI7	PI8	PI9	PI10
1.	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
2.	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5
3.	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4
4.	5	5	5	4	4	3	5	5	5	5
5.	4	3	4	4	3	3	4	5	4	4
6.	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
7.	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5
8.	4	2	4	5	3	5	4	5	4	5
9.	5	4	4	4	4	3	5	3	5	4
10.	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3
11.	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5
12.	5	5	4	4	4	3	5	5	4	3
13.	4	4	5	4	3	3	4	3	5	3
14.	5	2	4	5	3	5	5	3	3	5
15.	5	5	5	4	4	3	5	5	3	4
16.	4	3	4	5	4	5	4	4	4	5
17.	5	4	5	5	5	5	5	4	3	5
18.	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4
19.	5	2	5	5	5	4	5	4	3	5
20.	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4
21.	5	4	5	5	3	5	5	2	5	5
22.	5	2	4	4	4	5	5	5	4	4
23.	4	4	4	2	5	3	4	4	3	5
24.	4	5	4	4	3	2	4	5	3	3
25.	5	4	5	5	5	2	5	4	5	3
26.	4	2	4	4	5	5	4	2	4	4
27.	5	3	4	2	3	5	5	3	5	3
28.	4	5	4	4	5	2	4	4	3	4
29.	5	5	5	4	3	1	5	5	5	3
30.	5	3	4	4	3	2	5	5	3	5
31.	4	5	4	5	4	3	4	3	5	5
32.	5	5	5	4	3	1	4	4	3	4

Sistem Pelaporan (X3)						
No.	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6
1.	5	3	4	5	5	5
2.	4	5	5	5	4	5
3.	5	3	5	4	5	5
4.	5	5	5	5	4	5
5.	4	3	4	4	5	5
6.	5	5	5	5	5	5
7.	4	4	4	5	5	5
8.	4	5	4	5	4	5
9.	5	3	5	4	4	4
10.	5	4	3	5	5	4
11.	4	3	5	5	4	5
12.	5	5	4	4	5	5
13.	4	4	5	4	5	4
14.	5	5	5	5	5	5
15.	5	5	3	4	4	4
16.	4	3	4	5	4	5
17.	5	4	5	3	5	5
18.	5	5	4	4	4	5
19.	5	3	5	5	5	4
20.	4	4	5	4	4	5
21.	5	4	5	5	4	5
22.	5	5	4	3	4	4
23.	5	4	5	5	5	5
24.	4	5	4	3	5	4
25.	5	3	5	5	5	4
26.	5	5	4	4	4	5
27.	5	3	5	5	5	5
28.	5	3	5	5	5	5
29.	5	3	5	5	5	4
30.	5	3	4	5	5	5
31.	5	4	5	3	5	4
32.	5	3	5	4	5	5

Lampiran 3: Outer Loading Kuisioner



Lampiran 4: Outer Loading Matrix

Outer loadings - Matrix					
	AKIP	Alpha	PI	SP	
AKIP1	0.836				
AKIP2	0.860				
AKIP3	0.858				
AKIP4	0.894				
AKIP5	0.860				
AKIP6	0.777				
KSA1		0.766			
KSA10		0.861			
KSA2		0.881			
KSA3		0.752			
KSA4		0.901			
KSA5		0.774			
KSA6		0.728			
KSA7		0.805			
KSA8		0.831			
KSA9		0.737			
PI1			0.883		
PI10			0.789		
PI2			0.883		
PI3			0.749		
PI4			0.755		
PI5			0.838		
PI6			0.816		
PI7			0.804		
PI8			0.736		
PI9			0.825		
SP1				0.819	
SP2				0.850	
SP3				0.735	
SP4				0.804	
SP5				0.897	
SP6				0.851	

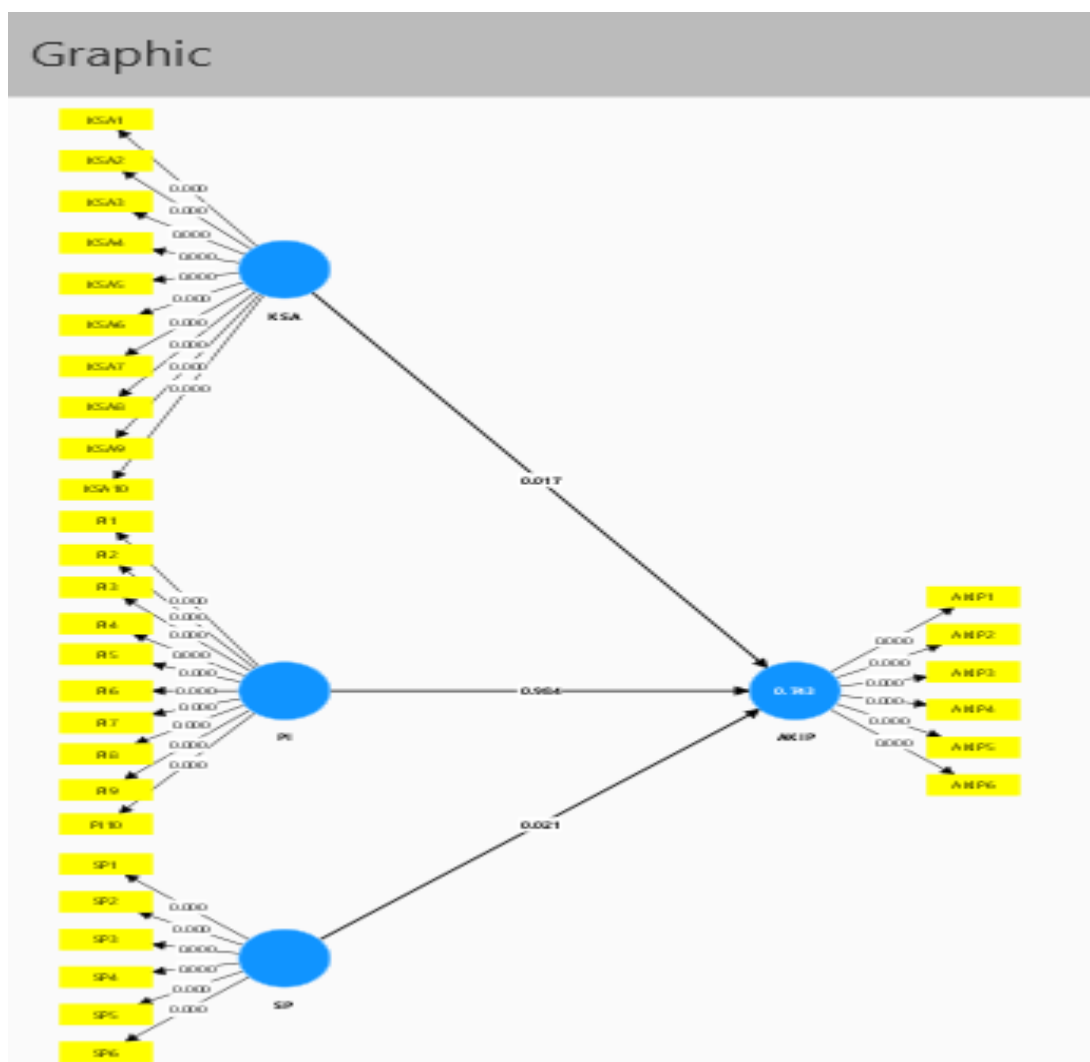
Lampiran 5: R-Square Overview

R-square - Overview			Copy to Excel/Word
	R-square	R-square adjusted	
AKIP	0.743	0.715	

Lampiran 6: Construct Reability and Validity-Overview

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
AKIP	0.922	0.928	0.939	0.720
KSA	0.940	0.954	0.948	0.649
PI	0.941	0.944	0.950	0.655
SP	0.908	0.919	0.929	0.685

Lampiran 7: Outer Loading Bootstrapping



Lampiran 8: Path Coefficients – Mean, STDEV, T-Values, P-Values

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
KSA -> AKIP	0.449	0.468	0.188	2.382	0.017
PI -> AKIP	0.002	0.006	0.126	0.020	0.984
SP -> AKIP	0.454	0.440	0.197	2.308	0.021

Lampiran 9: R-Square-Mean,STDEV, T-Value, P-Value

R-square - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
AKIP	0.743	0.774	0.116	6.385	0.000

Lampiran 10: Average Variance Extracted(AVE)- Mean, STDEV, T-Value, P-Value

Average variance extracted (AVE) - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
AKIP	0.720	0.722	0.066	10.982	0.000
KSA	0.649	0.651	0.069	9.431	0.000
PI	0.655	0.653	0.078	8.406	0.000
SP	0.685	0.687	0.064	10.746	0.000

Lampiran 11: Composite Reability-Mean, STDEV, T-Value, P-Value

Composite reliability (rho_c) - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
AKIP	0.939	0.938	0.020	47.964	0.000
KSA	0.948	0.947	0.017	57.236	0.000
PI	0.950	0.947	0.019	50.132	0.000
SP	0.929	0.927	0.021	44.634	0.000

Lampiran 12: Cronbach Alpha-Mean, STDEV, T-Value, P-Value

Cronbach's alpha - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
AKIP	0.922	0.919	0.027	34.543	0.000
KSA	0.940	0.939	0.018	52.860	0.000
PI	0.941	0.938	0.021	45.063	0.000
SP	0.908	0.904	0.029	31.404	0.000



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muktiar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6614567, Kode Pos 20228

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 140/IDT/ISKRAKT/FEB/UMSU/16/09/2024

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 16/09/2024

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DAFA FADHILA
NPM : 2105170003
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Kurangnya kompetensi akuntan yang memadai untuk mengelola aset dengan baik
Seperti permasalahan aset talan sebelumnya yang belum selesai ditindak lanjuti
2. lambangnya penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian internal dilihat dari
Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

Rencana Judul : 1. pengaruh kompetensi serta penerapan standar akuntansi pemerintahan dan
sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
2. pengaruh kompetensi, moralitas aparatur desa, dan sistem pengendalian
internal terhadap pencegahan fraud pengelola dana
3. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem
pengendalian internal, komitmen organisasi dan good governance
terhadap kualitas laporan keuangan

Objek/Lokasi Penelitian: BPKAD kota medan (kantor walikota Medan)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih,

Hormat Saya
Pemohon

(DAFA FADHILA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

Persetujuan Judul Penelitian

Nomor Agenda: 140/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/1609/2024

Nama Mahasiswa : DAFAN AJILLA
NPM : 2103170003
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 16/09/2024
Nama Dosen Pembimbing¹⁾ : Hj. Hafshah, S.E., M.Si (26 September 2024)

Judul Disetujui²⁾

*Pengaruh Kejelasan Saluran Anggaran, Pengendalian Internal
dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.*

Disetujui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assist. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 08 Desember 2024

Dosen Pembimbing

(Hj. Hafshah, S.E., M.Si)

Keterangan:
1) Dosen Wali Program Studi
2) Disetujui Dosen Pembimbing
Setelah disetujui oleh Prof. dan Dosen Pembimbing, maka dapat dilanjutkan ke proses pengajuan judul ke fakultas.

Lampiran ini ditandatangani dan nomor agenda ini dengan nomor agenda, pada saat pengajuan judul ke fakultas.
2 dari 2 halaman

Hafshah



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 03 Desember 2019

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

[Signature]

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : D A F A F a d h i l a
NPM : 1 1 0 5 1 7 0 0 0 3
Tempat/Tgl Lahir : Me d a n 2 0 0 7 2 0 0 3
Program Studi : Akuntansi
Alamat Mahasiswa : J l S i d o m u l y o G g S e m a n g k a
a t s N o 6 0 P a s a r 9
Tempat Penelitian : B a d a n R i s k a d a n I n d u s i
d a e r o h k o t a m e d a n
Alamat Penelitian : J l J e n d e r a i B e c a r 1 4
n o S u t i o n 1 0 3 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :

Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam

Pemohon

[Signature]
ASSOC. PROF. DR. Hg. Zuhra Hanum, S.E., M.Si

[Signature]
Dafa Fadhila



UMSU
Jalan Negeri 1 Medan

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINAH PESAKI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 28/SK/BAK-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Negeri Basri No. 1 Medan 20238 Telp: (061) 6622420 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> ** feb@umsu.ac.id feb@umsu.ac.id feb@umsu.ac.id feb@umsu.ac.id feb@umsu.ac.id feb@umsu.ac.id feb@umsu.ac.id feb@umsu.ac.id feb@umsu.ac.id

Nomor : 3253/IL3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 11 Jumadil Akhir 1446 H
12 Desember 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jln. Jenderal Besar AH Nasution No 32 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, selubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami mohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dafa Fadhila
Npm : 2105170003
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasana yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2017
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224667 Fax. (061) 6625474 - 6621003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 3253/TGS/ILJ-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 08 Desember 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama	Dafa Fadila
N.P.M	2105170003
Semester	VII (Tujuh)
Program Studi	Akuntansi
Judul Tugas Akhir	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafshah, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU;
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
3. Tugas Akhir dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 12 Desember 2025
4. Revisi Judul :

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Jumadil Akhir 1446 H
12 Desember 2024 M



Dekan

Dr. H. Juhari L. SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertanggung





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20141,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873114
Laman brida.medan.go.id, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0254

DAERAH

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

KEWASIHAN

1. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 3253/II.3-AU/UMSU-05/17/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Penhal Izin Riset Penelitian

KAWA

: Dafa Fadhlila

NIM

: 2105170003

JURUSAN

: Akuntansi

JUCUL

: "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "

LOKASI

: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

WAKTUNYA

: 3 (tiga) Bulan

PENANGGUNG JAWAB

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DemiNan Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mangunsyah, S. Sos, M. AP
Pembina Tk. I (M/B)
NIP. 196805031989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Salah Besar
Bertitikasi
Elektronik

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 1 "Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan hukum lainnya yang berwenang menggunakan alat bukti elektronik yang sah."



MAJLIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEMAJUAN PENSAH MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1572/P/BAH/PT/Akred/P/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Makmur Basi No. 1 Medan 20216 Telp. (061) 6672430 - 6672451 Fax. (061) 6672474 - 6671501
 http://feb.umsu.ac.id * fe@umsu.ac.id * E:umsu@umsu.ac.id * @umsu.ac.id * umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa
 Program Studi
 NPM
 Konsentrasi
 Nama Dosen Pembimbing
 Judul Penelitian

: Dafa Fadhila
 : Akuntansi
 : 2105170003
 : Akuntansi Sektor Publik
 : Hj. Hafsa, S.E., M.Si
 : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	Perjelas masalah pd latar belakang	4/des 2024	Jr.
Bab II	Perbaiki pengutipan teori	4/des 2024	Jr.
Bab III	Perjelas metodologi	6/des 2024	Jr.
Daftar Pustaka	Susun sesuai pedoman	8/des 2024	Jr.
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lampirkan data penelitian	10/des 2024	Jr.
Persetujuan Seminar Proposal	Selasai Bimbingan, Ass. Decupno	12/des 2024	Jr.

Medan, 12 Desember 2024

Pembimbing Skripsi

Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Hj. Hafsa, S.E., M.Si

Assoc. Prof. Dr. Zulla Hanum, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapdi. Muchtar Basri No. 3 57 (061) 6624567 Fax: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini, Selasa, 07 Januari 2025 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa:

Nama : Dafa Fadila
NPM : 2105170003
Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 20 Juli 2003
Alamat Rumah : Jl. Sidemulye GG. Senangka 15 no 60b pasar 9 Tembung
Judul Proposal : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Disetujui / Tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	latar belakang masalah, data praktik & penerapan data
Bab II	teori disesuaikan dengan kerangka konseptual
Bab III	Definisi operasional: kuesioner bisa ditambahkan
Lainnya	Sistematis penulisan - ksesi buku pedoman & jurnal Ditun Aki UMSU
Kesimpulan	☒ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, 07 Januari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoz. Prof. Dr. H. Zulfa Hanum, S.E., M.Si

Anggota

Riva Umar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafshah, S.E., M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. Syarifah Haris, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 07 Januari 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Dafa Fadhila
NPM : 2105170003
Terima / Tgl. Lahir : Medan, 20 Juli 2003
Alamat Rumah : Jl. Sidomulyo GG. Semangka 15 no 60b पास 9 Tembung
Judul Proposal : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Proposal dinyatakan layak dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Hj. Hafshah, S.E., M.Si*

Medan, 07 Januari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafshah, S.E., M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. Syafriah Hani, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n. Dekan
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Guruhwan, S.E., M.Si
NIDN : 0105057601

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

Nama : Dafa Fadhila
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 juli 2003
Alamat : Jln.Pukat Banting 1 No.6 Medan
No.Hp : 082281971150
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam

Identitas Orang Tua

Nama ayah : Sugi Waluyo
Nama ibu : Yenni Anggriani
Agama : Islam
Alamat : Jln.Pukat Banting 1 No.6 Medan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD IT Pesantren Nur Ihsan : 2009
SMP Muhammadiyah 01 Medan : 2015
SMA Muhammdiyah 01 Medan : 2018
Diterima di Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara : 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya

Medan, Maret 2025

Dafa Fadhila
2105170003